

**ANALISIS NORMATIF UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2013
TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) ATAS STATUS
HUKUM DAN PENGAWASAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Magister
Program Studi Magister Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

MULYANTO

2019-02-022

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN
ANALISIS NORMATIF UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2013
TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) ATAS STATUS
HUKUM DAN PENGAWASAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)

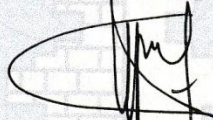
Disusun oleh
MULYANTO
2019-02-022

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 17 Februari 2023

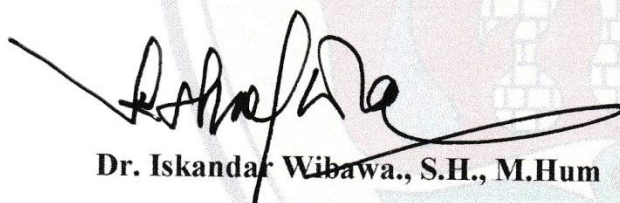
Susunan Dewan Penguji

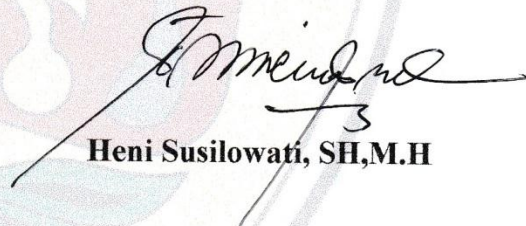
Pembimbing


Dr. Suparyo, S.H., M.S

Anggota Dewan Penguji I

Anggota Dewan Penguji II


Dr. Iskandar Wibawa., S.H., M.Hum


Heni Susilowati, SH,M.H

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister

Tanggal 7 Maret 2023



(Dr. Suparyo, S.H., M.S)

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Carilah Ilmu sampai ke Negeri Cina ”

Dalam menjalani hidup tidak ada kata berhenti untuk terus belajar

Janganlah berharap Apapun dari Ilmu yang kamu pelajari

Karena hakekatnya manusia dilahirkan di dunia yaitu untuk belajar, Belajar Dan belajar

Persembahan :

Tesis ini saya persembahkan untuk :

1. *Bagi Semua Orang Yang Haus Ilmu*
2. *Bagi Semua orang yang merasa Saja*



PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mulyanto

NIM : 2019-02-022

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Kudus, Februari 2023

Yang membuat Pernyataan



Mulyanto

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat-Nya saya bisa menyelesaikan penulisan tesis ini, shalawat serta salam senantiasa saya haturkan kepada Rasululla SAW yang saya nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti, Amin.

Keberhasilan penulisan Tesis ini tidak bisa dilepaskan dari banyak dukungan teman-teman, orang-orang terdekat saya yang selalu mensupport saya serta dari bimbingan dari para Dosen yang selalu dengan sabar membimbing saya. Ucapan terimakasih saya haturkan kepada :

1. Kepada Rektor Universitas Muria Kudus
2. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
3. Kepada Kaprodi Magister Hukum Universitas Muria Kudus
4. Kepada Dosen Pembimbing Utama
5. Kepada Dosen Pembimbing Pendamping

Kudus, Februari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan Masalah.....	12
2. Jenis Pendekatan Penelitian	13
3. Jenis dan Sumber Data.....	13
4. Metode Pengumpulan Data.....	15
5. Metode Analisis data.....	15
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Teori Hukum Gustav Radbruch	17
B. Pengertian Hukum	20
1. Sumber-Sumber Hukum Positif	21
2. Undang-Undang	22
C. UU No 25 tahun 1992.....	23

D. Undang undang No 17 Tahun 2012.....	24
E. UU No 1 Tentang Lembaga Keuangan Mikro	28
F. Lembaga Keuangan Mikro.....	30
G. Baitul Maal wat Tamwil	35
1. Karakteristik BMT sebagai Pemberdaya Ekonomi Rakyat.....	36
2. Regulasi dan Bentuk Badan	38
3. Jenis Pembiayaan BMT	41
H. Koperasi.....	51
1. Definisi Koperasi.....	51
2. Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi	52
3. Koperasi dan Ekonomi Kerakyatan.....	53
4. Pengawasan.....	56
I. Perseroan Terbatas (PT).....	56
1. Definisi Perseroan Terbatas.....	56
2. Landasan, Asas, dan Tujuan PT.....	57
3. Karakteristik Perseroan Terbatas (PT).....	58
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Status Hukum Dan Pengawasan Koperasi Dan Baitul Mal Watamwil	60
1. Status Hukum dan Pengawasan BMT Sebelum Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro	63
2. Status Hukum dan Pengawasan BMT Sesudah undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro	70
B. Pentingnya Status Hukum dan pengawasan koperasi dan BMT	76
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian.....	7
------------------------------------	---



**ANALISIS NORMATIF UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2013
TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) ATAS STATUS
HUKUM DAN PENGAWASAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)**

Mulyanto¹

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus
Email : mymulyanto28@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlunya status hukum dan pengawasan *Baitul Maal Wat Tamwil* sebelum maupun sesudah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan doktrinal serta menggunakan data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif, dan hasil datanya akan disajikan secara deskriptif

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan BMT yang memiliki badan hukum koperasi dalam bentuk nya koperasi jasa keuangan tunduk kepada Undang-Undang No.25 Tahun 1992. BMT yang berbadan hukum Yayasan yang tunduk kepada undang-undang No.28 Tahun 2004 . Status hukum dan Pengawasan BMT menjadi penting karena BMT sebagai Sektor keuangan mikro syariah dapat dibilang menjadi aspek penting dan unggul dari perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Kata Kunci : Lembaga Keuangan Mikro, Badan Hukum, Baitul Maal Wat Tamwil

¹ Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

ABSTRACT

This Study aims to find out and analyze the need for legal status and supervision of Baitul maal wat tamwil before and after law no 1 of 2013 concerning.

This research was conducted using a doctrinal approach and using primary and secondary data which will be analyzed qualitatively, and the results of the data will be presented descriptively.

The results of this study conclude that Bmt that have cooperative legal entities in the form of financial services cooperatives are subject to law no 25 of 1992. BMT that are incorporated as foundations are subject to law no 28 of 2004. Legal entity status and BMT supervision are important because BMT as an Islamic microfinance sector can be said to be an important and superior aspect of the development of Islamic economics in Indonesia.

Keywords : Microfinance Institutions, Legal Entities, Baitul Maal Wat Tamwil

